

MEMPERKERJAKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN HUKUM ISLAM

Skripsi

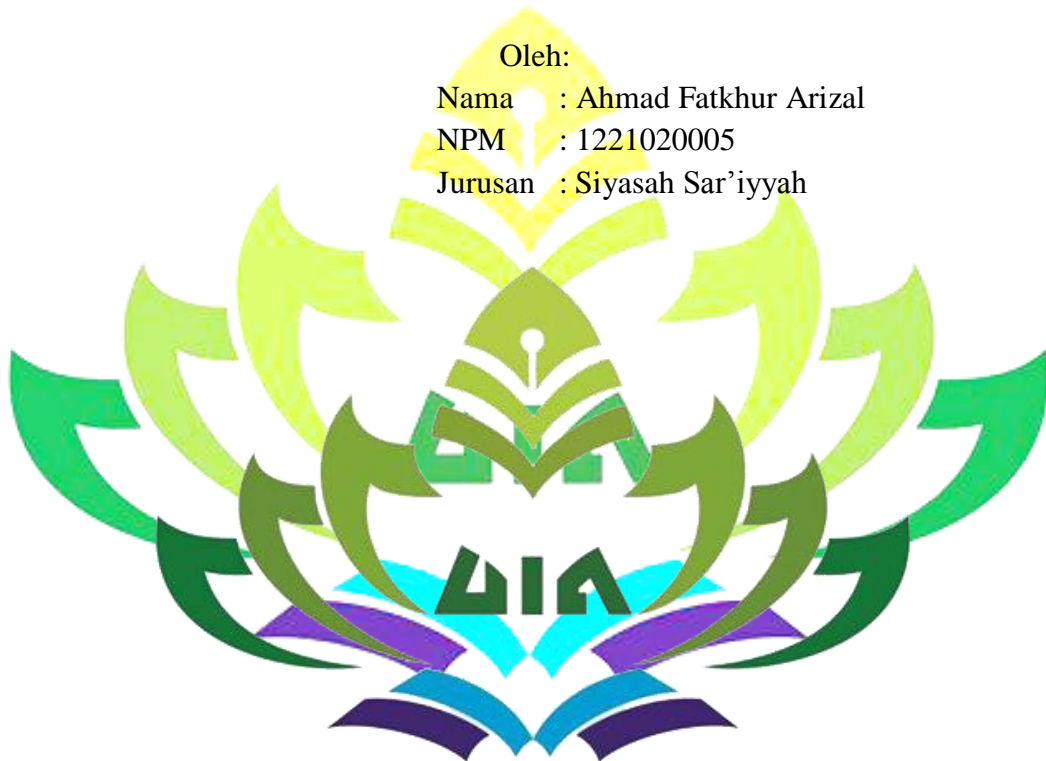
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh:

Nama : Ahmad Fatkhur Arizal

NPM : 1221020005

Jurusan : Siyasah Sar'iyah



**FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN SIYASAH SAR'IYYAH
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019 M**

MEMPERKERJAKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh:


Ahmad Fatkhur Arizal

NPM : 1221020005

Jurusan: Siyasah Sar'iyah

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-Undang yang bertujuan menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya patut dicermati. Terutama pada bab Anak. Pengaturan anak yang bekerja dibahas pada pasal tersebut, pada pasal 68 pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Di satu sisi, pasal 69-75. anak boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan tertentu, agar hak-hak dari anak itu tetap terpenuhi. Islam tidak ada larangan anak untuk dipekerjakan. kecuali, melanggar hak-hak yang di miliki oleh anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu (1). Bagaimana ketentuan mempekerjakan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mempekerjakan anak di bawah umur ? dan (2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mempekerjakan anak di bawah umur ? Adapun tujuan penelitian. (1). Untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap pelaku tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur. (2). Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mempekerjakan anak di bawah umur.

Jenis penelitian ini menggunakan kepustakaan atau *library research*. Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif

Temuan peneliti di era perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti saat ini. Masalah kemiskinan telah menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan bagi semua negara termasuk di Indonesia. Banyak anak-anak yang semestinya masih menikmati masa kecilnya untuk bermain dan belajar, sudah dipekerjakan. Mereka yang seharusnya ada di taman main atau di bangku sekolah, justru berada di tempat-tempat yang tidak layak, seperti pasar, terminal, lampu merah, dan bahkan ada yang di pabrik-pabrik. Kesimpulan penelitian ini adalah anak yang masih di bawah umur tidak dibolehkan dalam bekerja, tetapi anak yang di bawah umur ini masih diperbolehkan dalam pekerjaan yang ringan yaitu harus memenuhi persyaratan: pekerjaan tersebut untuk mengembangkan bakat dan minat anak, yang mana anak harus ada izin dari orang tuanya, waktu kerja paling lama 3 jam sehari, tidak mengganggu waktu sekolah, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Didalam Islam seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun juga tidak dibolehkan dalam bekerja karena anak di bawah umur (belum baligh) dalam islam menjadi tanggungan orang tuanya untuk memelihara dan mencukupi semua kebutuhannya baik jasmani maupun rohani. Sedangkan hak dan kewajiban anak berdasarkan hukum Islam diantaranya: anak mendapatkan pendidikan, baik menulis maupun membaca, pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rezeki yang halal.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmi Sukarame Bandar Lampung Tlpn (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : **AHMAD FATKHUR ARIZAL**
NPM : **1221020005**
Jurusan : **Siyasah Sar'iyyah**
Fakultas : **Syari'ah**
Judul : **MEMPERKERJAKAN ANAK DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 DAN HUKUM ISLAM**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.
NIP. 197408162003122004

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah Sar'iyyah

Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmi Sukarama Bandar Lampung Telpn (0721) 703260

PENGESAHAN

Sekripsi ini dengan judul: **Memperkerjakan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam** di susun oleh **Ahmad Fatkhur Arizal, NPM, 1221020005**, Program Studi: **Siyasah Sar'iyah**, telah di ajukan dalam sidang Monahqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal:

TIM MUNAQSAH

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.

Penguji Utama : H. Rohmat, S.Ag., M.HI.

Penguji Pendamping I: Dr. H. Khairuddin, M.H.

Penguji Pendamping II: Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (surat Al-Kahfi ayat 46)¹



¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, CV. Pustaka Agung Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 408

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji syukur Ku haturkan kepada Allah SWT Karena kasih sayang dan limpahan rahmat, hidayah dan nikmat Nya. Sholat dan salam akan selalu tercurahkan kepada jungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan terbaik karena telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yaitu Addinul Islam Karya ini ku persembahkan untuk

1. Ayahanda Samanto Ibunda Titik Junaidah, S.Pd. tercinta yang telah memberikan do'a dan semangat serta kasih sayang juga dukungan materil dan spiritualnya.
2. Kakak dan Adik penulis tersayang yang selalu memberikan spirit atas terselesainya skripsi ini.
3. Para sahabat, Chandra, Dadang Triyogi, Ahmad Anshori, Ahmad Fatkhur Arizal, Ahmad Yusuf, Agung Ramadhani, Ruslan Abdul Ghani, Sultan Tirta MB, yang telah memberikan dorongan, baik secara langsung maupun tidak langsung atas terselesainya skripsi ini.
4. Almamater yang tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan.



RIWAYAT HUDUP

Ahmad Fatkhur Arizal, lahir di Way kana pada tanggal 26 April 1994, merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara. Dilahirkan dari pasangan Bapak Samanto dan Ibu Titik Junaidah. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 01 Gedung Jaya pada tahun 2006, lalu melanjutkan ke tingkat SLTP N 04 Negara Batin hingga tahun 2009. Pada tahun 2012 tamat dari SMA Gajah Mada Bandar Lampung.

Pada tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu Jurusan Siyasyah Sar'iyyah dan telah menyelesaikan Skripsi dengan judul **MEMPERKERJAKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN HUKUM ISLAM**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya buat alam semesta, seiring dengan itu salawat dan salam kepada Nabi Muahammad SAW yang telah diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalah Islam iyah-Nya kepada segenap umat dijagat raya ini sebagai hidayah dan Irsyadah yang dapat menjamin kebahagiaan hidup umat manusia didunia dan ukhrawi.

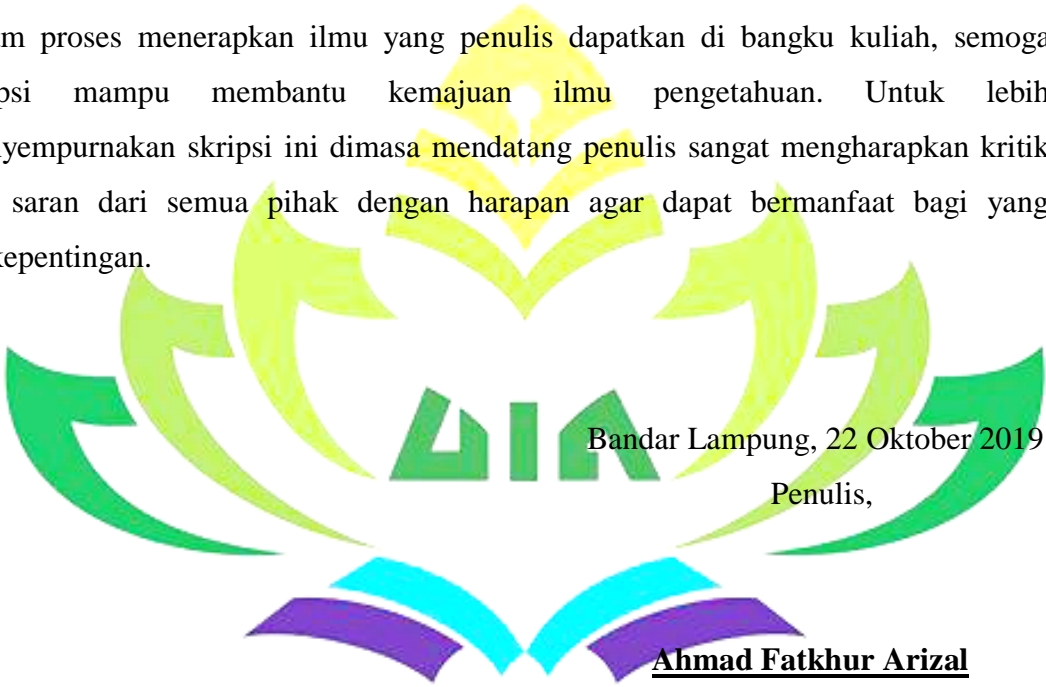
Dengan rahmat dan karunia Allah dan diiringi dengan ketekunan serta kesabaran dan bantuan dari pihak yang berkompeten, maka penulis dapat menyusun skripsi dengan judul: **“MEMPERKERJAKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN HUKUM ISLAM”**.

Dalam menyusun skripsi ini sudah barang tentu terdapat kekurangan-kekurangan, kejanggalan-kejanggalan, baik dari segi sistematika, materi dan bahasa dan segala apa yang perlu dipenuhi dalam penulisan karya ilmiah. Dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Disamping itu penulis banyak mendapat dorongan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, moril maupun material. Untuk itu sewajarnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung, beserta jajarannya.
2. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Syariah, dan Dr. H. Khairuddin, M.H beserta stafnya, Bapak/ ibu Dosen yang telah memberikan bermacam-macam disiplin ilmu kepada penulis.
3. Yang terhormat Bapak Drs.Susiadi AS., M. Sos, I, Selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Yang terhormat Bapak: Dr. H. Khairuddin, M.H selaku pembimbing I dan Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. Selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis guna kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.
5. Petugas perpustakaan Fakultas Syari'ah dan petugas perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari hasil penelitian masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam proses menerapkan ilmu yang penulis dapatkan di bangku kuliah, semoga skripsi mampu membantu kemajuan ilmu pengetahuan. Untuk lebih menyempurnakan skripsi ini dimasa mendatang penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak dengan harapan agar dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.



Bandar Lampung, 22 Oktober 2019

Penulis,

Ahmad Fatkhur Arizal
NPM. 1221020005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penjelasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	13
F. Metode Penelitian.....	13
 BAB II MEMPERKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM UNDANG-UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN	
A. Anak Dibawah umur Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan.....	19
B. Memperkerjakan Anak Dibawah Umur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan.....	22

C. Macam-Macam Memperkerjakan Anak Dibawah Umur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	25
D. Tinjauan Anak Dibawah umur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan	29
BAB III MEMPERKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM HUKUM ISLAM	
A. Anak di bawah umur Dalam Hukum Islam	31
B. Hak-Hak Anak Dibawah Umur Dalam Hukum Islam	35
C. Macam-Macam Memperkerjakan Anak Dibawah Umur Dalam Hukum Islam.....	39
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Memperkerjakan Anak Dibawah Umur	49
BAB IV ANALISIS	
A. Memperkerjakan Anak Dibawah Umur Menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjan Yang Terbentuk Memperkerjakan Anak Dibawah Umur	52
B. Memperkerjan Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam	58
1. Analisis Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Dengan Motivasi.....	59
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Dengan Motivasi Mencari Uang.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
C. Penutup	71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu penulisan akan menjelaskan maksud dari istilah-istilah yang terdapat dari judul ini, dengan adanya penjelasan di harapkan dapat menghindari ini kemungkinan pemahaman lain dari apa yang di maksud sebenarnya.

Adapun judul skripsi ini adalah “**Memperkerjakan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam**” dan istilah-istilah yang di jelaskan sebagai berikut:

Tenagakerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.²

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-Undang yang bertujuan menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya patut dicermati. Terutama pada bab Anak. Anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 68 sampai dengan Pasal 75. Pengaturan

²Abdulssalam, *Hukum Ketenagakerjaan Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PTIK. 2016), hlm 8

anak yang bekerja dibahas pada pasal tersebut, pada Pasal 68 pengusaha dilarang memperkerjakan anak. Di satu sisi, Pasal 69-75 anak boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan tertentu, agar hak-hak dari anak itu tetap terpenuhi..

Tinjauan hukum Islam terhadap pekerja anak, di mana batasan umur masih terdapat perbedaan akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang mu'amalah maaliyah sangat berhati-hati terutama dalam menentukan kapan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu: 18 tahun keatas. Walau seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun tetap dibolehkan dalam bekerja namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan semua elemen. Sebagaimana Islam memberikan perhatian yang besar terhadap anak sebagai generasi yang hidup hari ini dan cikal bakal generasi masa depan di satu sisi dan penekanan akan pentingnya kuantitas dan kualitas umat.

Dari uraian istilah yang terjadi dalam judul di atas maka yang di maksud judul skripsi ini adalah mengkaji meneliti tentang ketentuan memperkerjakan anak di bawah umur.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Di Indonesia pelanggaran hak anak sudah menjadi pemberitaan yang lazim, bahkan sudah menjadi pemandangan yang tidak dapat dielakkan lagi. Banyak dengar pemberitaan bahkan melihat sendiri kasus-kasus yang mengabaikan hak-hak mereka selaku anak, seperti: kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak dan memperkerjakan anak di bawah umur, berbanding terbalik dengan yang tertuang dalam Undang-Undang.
- b. Anak harus dilindungi dari segala bentuk ketelantaran, kekerasan, penganiayaan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan anak, tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, serta dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya, tetapi kenyataan yang terjadi justru masih banyaknya hak-hak anak yang diabaikan seperti banyaknya pekerja-pekerja dari kalangan anak-anak.

2. Alasan Subjektif

- a. Banyak terjadinya buku penunjang untuk memenuhi kebutuhan ini serta membahas permasalahan ini sehingga nantinya penulis dapat selesai pada waktunya.

- b. Pokok pembahasan sekripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulisanya pelajari di fakultas syari'ah jurusan jinayah siyasah.

C. Latar Belakang Masalah

Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dan Allah telah menundukkan alam semesta ini untuk kepentingan manusia. Kedudukan manusia sebagai khalifah adalah untuk membangun dunia ini dan untuk mengeploitasi sumber-sumber alamnya dengan cara melakukan pekerjaan dan kegiatan bisnis.

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis, dan hal tersebut juga diatur dalam Al-Qur'an. Lebih jauh Al-Qur'an juga memuat tentang bentuk yang sangat detail mengenai praktek bisnis yang diperbolehkan. Konsep Al-Qur'an tentang bisnis sangatlah komprehensif, sehingga parameternya tidak hanya menyangkut dunia, tetapi juga menyangkut urusan akhirat.³ Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الجمعة: ١٠]

Artinya: Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Al-Jumu'ah : 10)⁴

³ Buchari Alma, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal 1

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Semarang: PT. Toha Putra, 1989), hal

Tanggung jawab manusia sebagai khalifah adalah mengelola resources yang telah disediakan oleh Allah secara efisien dan optimal agar kesejahteraan dan keadilan dapat ditegakkan. Dengan demikian, segala macam kegiatan ekonomi yang diajukan untuk mencari keuntungan tanpa mengabaikan hak-hak pekerja atau karyawan yang bekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan anak yang dibah umur dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 26 berikut ini “ Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”. Sementara dalam Pasal 68 dijelaskan pengusaha dilarang memperkerjakan anak sebagai berikut; “ Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.

Namun dalam Islam pase umur seseorang itu terbagi kepada tiga tingkatan yaitu tamyiz (seseorang dalam umur tamyiz itu berada antara 0-15 tahun), baligh (sementara dalam umur baligh itu dari umur 15 tahun dimana ajaran Agama telah wajib ia jalani sebgai mukallaf, secara hukum ia telah cakap), dan rusyd (adalah seorang manusia yang telah dewasa atau berumur dari 20 tahun keatas), yang masing masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri.⁵ Dalam banyak literatur, usia baligh dalam Islam secara hukum telah cakap untuk berbuat atas dirinya, karena kewajiban agama telah dipikulkan padanya. Dalam bekerja ia telah cakap.

⁵ Ibnu Rusyd, Bidayatul al-Mujtahid wa Nahayatul Muqtashid, terj, Imam Ghazali Said dkk, Analisa Fiqh Para Mujtahid, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Amini, 2002), hal. 10

Namun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mereka belum dianggap cakap dalam melakukan suatu pekerjaan sebagai mana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam undang ini yang dikatakan anak harus dilindungi itu sebagaimana yang terdapat dalam pasal 65 aya 1 sebagai berikut; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam pasal 66 ayat 12 menerangkan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara”. Dalam penjelasan ayat ini dinyatakan bahwa “Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Dalam Undang-Undang perlindungan anak ini, yang menyangkut dengan perlindungan anak dibawah umur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 66⁶ berikut ini:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:

⁶ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 66

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang
- b. Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- c. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- d. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dari penjelasan dalam dua Undang-Undang diatas dapat dilihat bahwa anak-anak tidak boleh dipekerjakan atau eksploitasi secara ekonomi, namun dalam kenyataannya tidak seperti yang tertera dalam undang-undang, tapi masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang melanggar undang ini-undanghwaab naskagneem agju hallA inal gnay taya mala seorang kepala keluarga untuk memelihara keluarga nya sebagi mana dalam surat Al-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُواْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦ [التحريم: ٦]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai (perintah)

Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. A-Tahrim/66: 6)⁷

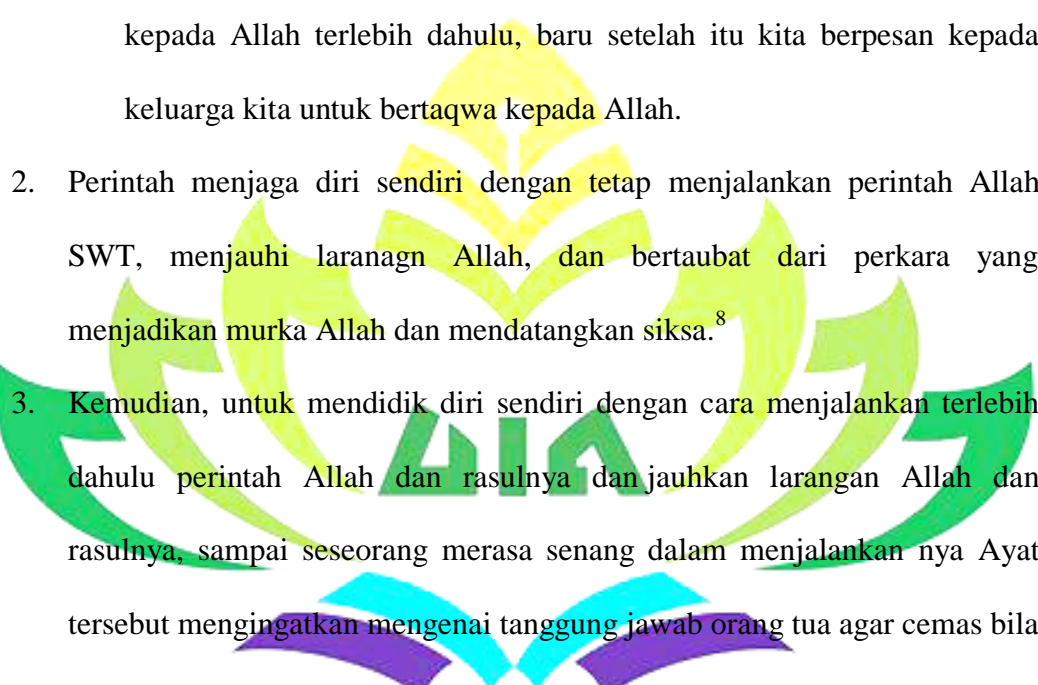
Mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka", Mujahid (Sufyan As-Sauri mengatakan, "Apabila datang kepadamu suatu tafsiran dari Mujahid, hal itu sudah cukup keluarga kalian untuk bertaqwa kepada Allah". Sedangkan Qatadah mengemukakan: "Yakni, hendaklah engkau menyuruh mereka berbuat taat kepada Allah dan mencegah mereka durhaka kepada-Nya. Dan hendaklah engkau menjalankan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan mereka untuk menjalankannya, serta membantu mereka dalam menjalankannya. Jika engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, peringatkan dan cegahlah mereka."

Demikian itu pula yang dikemukakan oleh Adh Dhahhak dan Muqatil bin Hayyan, dimana mereka mengatakan: "Setiap muslim berkewajiban mengajari keluarganya, termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah Ta'ala kepada mereka dan apa yang dilarang-Nya."

Dari uraian diatas, dapat kita ambil poin-poin penting yang dapat kita jadikan pegangan dalam membina diri sendiri dan orang lain:

1. Proses pembinaan dimulai dari diri sendiri.

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Semarang: PT. Toha Putra, 1989), hal 560

- 
- a. Hal ini tersurat dengan jelas dalam At Tahrim yaitu “Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. Disini dikatakan “peliharalah dirimu” terlebih dahulu baru setelah itu dikatakan “keluargamu”.
 - b. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Mujahid: “Bertaqwalah kepada Allah dan berpesanlah kepada keluarga kalian untuk bertaqwa kepada Allah”. Disini Mujahid mengatakan bahwa kita diharuskan bertaqwa kepada Allah terlebih dahulu, baru setelah itu kita berpesan kepada keluarga kita untuk bertaqwa kepada Allah.
2. Perintah menjaga diri sendiri dengan tetap menjalankan perintah Allah SWT, menjauhi larangan Allah, dan bertaubat dari perkara yang menjadikan murka Allah dan mendatangkan siksa.⁸
 3. Kemudian, untuk mendidik diri sendiri dengan cara menjalankan terlebih dahulu perintah Allah dan rasulnya dan jauhkan larangan Allah dan rasulnya, sampai seseorang merasa senang dalam menjalankannya. Ayat tersebut mengingatkan mengenai tanggung jawab orang tua agar cemas bila meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah dalam segala hal. Baik dalam arti lahiriah maupun rohaniah. Berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar nantinya tumbuh dan berkembang secara formal. Pendidikan seorang anak yang belum dewasa haruslah seimbang. Keduniawian ditujukan untuk mempersiapkan masa depan

⁸ <http://akuzamir.blogspot.com/2012/08/menjaga-diri-sendiri-dan-keluarga.html>

seorang anak hingga suatu saat setelah dewasa nanti hidup mandiri. Pendidikan keagamaan dimaksudkan agar setelah dewasa tetap tunduk dan patuh kepada Allah swt.

Hukum perburuhan adalah sebagian dari hukum yang berlaku (segala peraturan-peraturan) yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara buruh (pekerja) dengan majikan atau perusahaannya, mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut.⁹

Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak, anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Menurut Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan setiap yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.¹⁰ Pada dasarnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi pengusaha. Sebuah kemashlahatan dalam banyak kasus, dikalangan keluarga miskin anak biasanya bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah tangganya yang bertujuan membantu orang tuanya. Hubungan kerja yang ditetapkan pada pekerja anak ada bermacam-macam bentuk. Sebagai buruh anak menerima imbalan atau upah untuk pekerjaannya, untuk pekerja anak yang magang

⁹ Soetikno, Hukum Perburuhan, (Jakarta, 1997), hlm 5

¹⁰ Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 111

mereka ada yang di bayar dan ada yang tidak di bayar. faktor yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran keterlibatan anak ke arah sektor publik.¹¹

Pertama, berkaitan dengan kemiskinan atau ketidak mampuan ekonomi keluarga. Salah satu upaya yang dilakukan keluarga miskin untuk menambah penghasilan keluarga, selain mengikut sertakan istri kedalam kegiatan publik, adalah dengan memanfaatkan tenaga kerja anak meski mereka belum cukup umur.

Kedua, berkaitan dengan keinginan anak sendiri yang dengan sadar memilih dunia “eksploitasi di luar rumah” daripada terus menerus bekerja dibawah kendali orang tua mereka sendiri. Bagi anak-anak yang bekerja, dengan memilih keluar dari suasana rumah yang membosankan dan penuh dengan tekanan untuk sebagian mungkin melegakan apalagi ketika mereka bisa memegang dan mengendalikan pemanfaatan uang secara mandiri. Namun demikian, bukan berarti kehidupan pekerja anak kemudian menjadi serba menggemirakan karena mereka bisa relatif bebas.

Ketiga, berkaitan dengan kepentingan pengusaha yang senantiasa ingin mengakumulasikan keuntungan sebanyak-banyaknya. Bahwa dalam sistem yang kapitalistis di negara mana pun, yang namanya pengusaha ingin menekan

¹¹ Ibid, hlm. 122

biaya produksi serendah-rendahnya, khususnya upah pekerja.¹² Salah satu usaha yang dilakukan dengan cara mempekerjakan buruh wanita atau buruh anak. Sebenarnya, secara psikologis dengan melatih anak bekerja secara mandiri atau bekerja dalam rangka membantu orang tua memiliki efek pedagogis yang positif. Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik menyusun permasalahan pekerja anak ke zaman sekarang yang berdasarkan realita yang terjadi. Ketetapan dalam Undang-Undang bahwa masalah pekerja anak merupakan persoalan yang serius untuk di tanggulangi. Bahkan pada saat ini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah dan orang tua sangat berperan memberikan kebebasan kapan anak untuk menggali potensi yang berkualitas. Sehingga penulis tertarik membuat skripsi dengan judul: "Memperkerjakan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam".

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas maka rumusan masalah yang hendak dikemukakan Penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan memperkerjakan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan ?

¹² Soedjijarto, 1996, Persepsi, Kebijakan dan Program Departemen pendidikan dan Kebudayaan yang Berdampak Langsung atautun Tidak Langsung terhadap pekerjaan Anak, Mohammad Joni dan Zhulchaina Z. Tanamas, *ibid*, hlm. 112.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap memperkerjakan anak di bawah umur ?

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui aspek hukum perlindungan pekerja anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenaga kerjaan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap memperkerjakan anak di bawah umur.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menjadi masukan bagi masyarakat dan penegak hukum dalam mencegah terjadinya mempekerjakan anak di bawah umur.
- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca guna pengembangan ilmu kedepannya dalam bidang hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*)¹³ adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan.¹⁴
- b. Sifat penelitian ini bersifat *Deskriptif Analisis*. Metode *deskriptif analisis* adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara *objektif*. Pada umumnya tujuan utama penelitian *deskriptif* adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.¹⁵ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan metode *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang didasari pada Al-Qur'an, hadist, peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.

2. Sumber dan Jenis Data

- a. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka sumber data

¹³ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 102

¹⁴ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-5, 2003), hlm, 27

¹⁵ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2007), hlm. 18

diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai ketenagakerjaan, Undang-Undang, Al-Qur'an, maupun hadist yang berkaitan dengan penelitian.

b. Jenis-jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.¹⁶ Dalam tulisan ini diantaranya berupa Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang Pilkada dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu, buku-buku, makalah, majalah, jurnal, maupun akses artikel internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, seperti Al-Qur'an, Hadist, buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-artikel, peraturan perundang-perundangan, pendapat sarjana dan bahan-bahan lainnya. Situs

¹⁶. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 133

Web juga menjadi bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.¹⁷ Metode ini dimaksudkan untuk menggali data kepustakaan dan konsep-konsep serta catatan-catatan yang berkaitan dengan pekerja anak di bawah umur terutama dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4. Metode Pengolahan Data

Mengolah Data yaitu menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Jadi dalam hal ini yang dimaksud pengolahan data adalah memilih secara hati-hati, menyusun dan mengatur data yang relevan tepat dan berkaitan dengan masalah yang di teliti, adapun langkah-langkah yang harus diteliti dalam proses pengolahan data adalah:

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti.
- b. Penandaan Data (*Coding*), yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis sumber data (Al-Qur'an, Hadist, dan buku-buku literatur lainnya).

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 13

- c. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi Data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁸

Setelah terkumpul data, penulis mengoreksi data dengan cara mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur berurutan sehingga dapat menjadi sebuah permasalahan yang dapat dipahami, dengan menetapkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang telah dilakukan, maka selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, deduktif, dan komparatif. Metode berfikir induktif adalah keputusan baru yang bersifat umum yang didapat dari keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan yang dimaksud metode berfikir deduktif adalah suatu penganalisaan yang berangkat dari pengetahuan yang umum, kita hendak menilai suatu kejadian dengan secara

¹⁸. *Ibid.*, hlm. 132

khusus.¹⁹ Selanjutnya menggunakan analisis komparatif, yaitu suatu metode yang membandingkan dua atau lebih tokoh atau aliran, yang menelaah kesamaan atau perbedaan.²⁰

Dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terapat dalam pokok permasalahan.



¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset*, Gajah Mada University Press, (Yogyakarta, 2001), hlm 50

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 135

BAB II

MEMPERKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM UU RI NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

E. Pengertian Memperkerjakan Anak Dibawah umur

Untuk menentukan siapakah yang di sebut anak atau orang yang belum dewasa. Hal demikian erat kaitanya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Berbagai pendapat omuan barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikat nya berkesimpulan bahwa anak menjadi manusia dewasa normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tersebut. Sehingga yang di sebut anak atau orang yang belum dewasa terdapat sejumlah pendapat, baik pengertian, penguraian fase-fase perkembangan nya maupun batasan umur untuk di sebut dewasa.²¹

R. A. Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karna mudah terpengaruh disekitarnya.²²

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa menurut hukum adat seorang di katakan belum dewasa bila mana seorang itu belum menikah dan belum berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa, tidak perlu di permasalahan karna pada

²¹ Romli Atmasasmita, 1983, Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja(Yuridis Susio Krimonologis), Armico, hlm. 33.

²² R. A. Koesnoen, 1964, hlm. 120.

kenyataan nya walau pun orang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya, walau pun mereka belum wewenang kawin.²³

Dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “belum cukup umur (minderjarig)”, Serta beberapa definisi yang pasalnya. Seperti pada Bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada pasal 45 yang berbunyi .²⁴“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut.”

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun. Kelahiran anak (bayi) karena perkawinan sedikit banyaknya menyebabkan hal-hal tertentu dalam pelbagai kehidupan

²³ Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat,(jakarta, Fajar Agung, 1987), hal. 10, dalam Irma Setyowati Soemitro,Op. Cit., hlm. 18.

²⁴ <http://ririnpuspitasarifr.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-anak-menurut-undang-undang.html>

bernegara dan bermasyarakat. Secara hukum kelahiran tersebut mempunyai atau menimbulkan akibat hukum.²⁵

Dalam lapangan hukum perdata akibat hukum ini berpokok kepada anak dan kewajiban seperti: kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak dan penyangkalan sahnyanya anak, perwalian, pendewasaan, dan pengangkatan anak. yang dimaksud dengan anak kandung adalah anak yang dilahirkan dari dalam rahim seorang ibu; sedangkan anak terlantar adalah anak yang tidak terpelihara kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial; anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar; anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan bakat istimewa; anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan; anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang

²⁵ Undang-Undang No 23 Tahun 2002

tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar.²⁶

F. Ketentuan Mempekerjakan Anak Dibawah Umur

Hukum Ketenagakerjaan anak di bawah umur Yang dimaksud mempekerjakan anak di bawah umur adalah menyuruh dan atau membiarkan anak-anak usia di bawah 13 tahun bekerja selayaknya orang dewasa guna mendapatkan materi baik untuk kebutuhan dirinya sendiri, membantu keluarganya, atau diambil manfaat oleh orang-orang yang mempekerjakannya.²⁷

Hak anak menegaskan bahwa anak-anak yang bekerja dilarang mengeksploitasi, aturan pada pasal 32 yang menyatakan tentang larangan melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak. Hukum Nasional telah mengatur terhadap pengusaha tentang larangan mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1948 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 dan peraturan menteri Nomor 1 tahun 1987 oleh menteri tenaga kerja yang memberikan izin bagi pengusaha untuk menjalankan pekerjaan dengan syarat-syarat kriteria tertentu dalam peraturan tersebut. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang ketenaga kerjaan, pasal 95 menegaskan pengusaha di larang mempekerjakan anak, namun pasal 96 memberikan peluang bagi pengusaha untuk mempekerjakan anak-anak yang

²⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen Sosial RI, Ibid, h. 14.

²⁷ Muhammad joni dan zhulchaina z. Tanamas, Op ., cit., hlm. 89.

alasan ekonomi terpaksa bekerja. Hal demikian dimungkinkan karna kondisi tenaga kerja berlebihan atau *labour surplus* dan kemiskinan ekonomi keluarga sehingga sulit untuk melarang secara konsisten terhadap anak-anak yang bekerja.²⁸

Disini menunjukkan anak mempunyai hak untuk hidup dan hak kelangsungan hidup berarti bahwa anak memiliki hak atas kehidupan yang layak dan pelayanan kesehatan. Keluarga, masyarakat dan negara harus memperhatikan kelangsungan hidup anak. anak-anak berhak mendapat gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik, pendidikan dan sebagainya. Hal itu sesuai dengan prinsip dasar Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 perlindungan anak yang didasarkan atas hak anak yaitu hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Berikutnya tentang masalah mendapatkan perlindungan dalam hukum, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menghendaki adanya perlindungan anak dalam hal memelihara kebutuhan anak (hak-hak anak). Pemeliharaan anak bukan sekedar kewajiban keluarga akan tetapi juga kewajiban masyarakat untuk menjaga dan memelihara dalam hal sosial. Di dalam Undang-Undang Perkawinan juga disebutkan dalam pasal 45 yaitu:

²⁸ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009), hlm 159

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pasal 41 berbunyi: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

C. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengusaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.

D. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Kalau ditinjau dari segi perikemanusiaan dan kegunaan nya, anak anak masih belum bisa mengemban tanggung jawab pada pekerjaannya mengingat:²⁹

1. Anak-anak dan masih harus mendapat bimbingan dari orang tuanya dan memperoleh pendidikan yang cukup bagi kehidupan masa depannya.
2. Tenaga dan akal pikiran mereka belum memungkinkan untuk mengemban kerja, mereka masih lemah tenaga dan akal pikirannya, yang sesungguhnya mereka masih mendapat perlindungan dari orang tuanya.
3. Cara bekerja mereka sesungguhnya belum bisa diandalkan karena dalam usia yang sangat muda itu sepiantasnya mereka itu masih suka bermain

²⁹ G. Kartasapoetra dkk, Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila, hal. 38

main, kalau mereka itu dipekerjakan akan timbul kecerobohan kecerobohan yang dapat mengakibatkan pada diri sendiri.

G. Persyaratan Dalam Mempekerjakan Anak Dibawah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diharapkan dapat memberikan perlindungan dalam bidang ketenagakerjaan yang dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu; aspek perlindungan sosial, perlindungan ekonomis dan perlindungan, teknis. Dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjaan anak masih menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 69-75. Pekerjaan anak menurut Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003, yaitu:

Hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara seorang pengusaha dengan seorang pekerja dan lahir karena perjanjian kerja yang di dalamnya memuat unsur perintah, pekerjaan dan upah. Perjanjian kerja melahirkan perikatan dan perikatan yang lahir karena perjanjian kerja ini yang merupakan hubungan kerja. Hubungan kerja hanya ada apabila salah satu pihak dalam perjanjian dinamakan pengusaha dan pihak lain dinamakan pekerja. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak dalam pelaksanaan hubungan kerja melalui pembuatan perjanjian kerja dengan bentuk tertulis, tujuannya sebagai upaya mencapai kepastian hukum dan untuk melindungi pekerja dan tindakan sewenang-wenang pihak pengusaha. Walaupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak memaksa untuk bentuk tertulis sebagaimana diatur

Pasal 51 ayat (1), yaitu : "Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan".³⁰

Persyaratan adanya perjanjian kerja dalam suatu hubungan kerja bagi tenaga kerjaana sifatnya wajib sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (2) yang berbunyi :

Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai mana di maksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyrtan:

- a. Izin tertulis dan orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas;
- g. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.³¹

Secara struktural, peran negara dan pemerintah bukan hanya cukup dengan membuat peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih dan itu adalah melaksanakan peraturan yang telah dibuat diwujudkan menjadi kenyataan. Hal ini merupakan tuntutan, karena Indonesia menganut Negara hokum dalam arti materiil atau negara kesejahteraan atau negara kemakmuran (*welfare state*) yang menjamin keadilan kepada warganya yang tercipta karena atas berkat rahmat serta ridha Allah Yang Maha Kuasa (*baldatun thayibatun ghaffur*) dan

³⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

³¹ Abdulssalam, *Hukum Ketenagakerjaan Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PTIK, 2016), hlm 208

dengan didorong oleh keinginan luhur bangsa untuk berkehidupan, kebangsaan yang bebas, merdeka berdasarkan suatu ketertiban menuju kesejahteraan.³² Artinya negara turut campur dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwaju dan perlindungan hukum. Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979 dirumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik di dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.³³

³² Ali Achmad, *Mengungkap Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta, Chandra Pratama, 1996), hlm 32

³³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2

D. Fakta Dan Penyebab Mempekerjakan Anak Dibawah umur

Posisi anak Indonesia sangat lah rentangdengan keadaan ekonomi yang terpuruk ini, banyak anak yang terpaksa dan di paksa untuk berkerja membantu dan mencukupi kebutuhan ekonomi orang tua nya dalam menckupi pangan dan menyambung hidup sehariannya. Sampai saat ini pekerjaan anak masih belum terdata secara pasti.

Pekerjan anak tersebar merata keberadaan nya baik di pedesaan maupun di pekotaan. Pekerjaan anak di pedesaan lebih banyak. melakukan di petanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan, juga termasuk kegiatan di lingkungan keluarga membantu memenuhi kebutuhan orang tua nya. Sedangkan pekerjaan anak di pekotaan dapat di temukan di perusahaan, perindustrian, pembantu rumah tangga, mengamen, penjual koran, pemulung, meminta-minta, beberapa di antara pekerjaan merekayang di lakukan anak tersebut dapat di kategorikan pekerjaan terburuk bagi anak.

Banyak alasan di kemukakan sebagai pembenaran terhadap keberadaan pekerjaan anak tersebut. Dari berbagai alasan di kemukakan, factor kemiskinan dan kondisi ekonomi sebagai factor pendorong utama bagi pekerjaan anak. Mempekerjakaan anak adalah suatu terburuk di Indonesi, namun demikian keadaan seperti itu sudah ada sejak di jajah bangsa belanda. Sejarah perlindungan anak yang bekerja di mulai sejak jazan itu, di tanndai dengan di keluarkan nya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang

pelanggaran memperkerjakan anak di bawah umur. namun upaya yang dilakukan upaya melalui peraturan Perundang-Undangan dalam rangka melindungi bagi anak yang bekerja tersebut lebih menitik beratkan kepada perlindungan anak bagi yang bekerja, bukan khusus diajukan untuk menghapus keberadaan pekerjaan anak secara menyeluruh.³⁴

Mempekerjakan anak di bawah umur belakangan ini menjadi fenomena yang marak di mana-mana. Terutama semenjak krisis ekonomi mendera Indonesia, dan jumlah orang miskin bertambah, fenomena ini semakin kentara. Banyak anak-anak yang semestinya masih menikmati masa kecilnya untuk bermain dan belajar, sudah dipekerjakan. Mereka yang seharusnya ada di taman main atau di bangku sekolah, justru berada di tempat-tempat yang tidak layak, seperti pasar, terminal, lampu merah, dan bahkan ada yang di pabrik-pabrik. Anak-anak tersebut kehilangan kesempatan untuk meraih masa depan yang cerah. Karena masa yang seharusnya digunakan untuk penempatan mental spiritual dan pemberdayaan insani untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan, justru dihabiskan di tempat yang selayaknya hanya di tempat orang dewasa. Anak-anak tersebut telah memerankan diri sebagai orang dewasa bekerja mencari nafkah untuk membantu keluarganya. Mereka kehilangan hak-haknya sebagai anak-anak dan terampas masa depannya.³⁵

³⁴ Abintoro Prakoso, 2009, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta, hlm. 164

³⁵ <http://sarmidihusna.blogspot.co.id/2008/12/mempekerjakan-anak-di-bawah-umur.html>

Untuk menangani masalah pekerjaan anak, intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya kementerian pendidikan dan kebudayaan adalah menyelenggarakan pendidikan dan memperluas akses pendidikan anak-anak. Pelayanan pendidikan itu dimaksudkan sebagai media secara langsung atau tidak secara langsung untuk mencegah anak-anak memasuki lapangan pekerjaan. Dalam hal ini terdapat beberapa program yang telah dan terus dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pekerjaan anak, yakni;

1. Menyelenggarakan program wajib belajar, program beasiswa dan program magang.
2. Menyelenggarakan program kelompok usaha (kejar usaha);
3. Program lain yang berdampak secara tidak langsung pengurangan jumlah pekerjaan anak;
4. Kepedulian kementerian pendidikan dan kementerian kebudayaan terhadap pekerja anak;
5. Mempersiapkan program pendidikan pada usia dini atau *early childhood development*, dan pendidikan usia dini.³⁶

³⁶ Soedjijarto, 1996, Persepsi, Kebijakan dan Program Departemen pendidikan dan Kebudayaan yang Berdampak Langsung atau Tidak Langsung terhadap pekerjaan Anak, Mohammad Joni dan Zhulchaina Z. Tanamas, *ibid*, hlm. 113

BAB III

MEMPERKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM HUKUM ISLAM

A. Anak di bawah umur Dalam Hukum Islam

Islam memandang anak, dalam tulisan ini akan dipaparkan kedudukan anak sebagai karunia dalam perkawinan. Dalam posisi ini anak merupakan salah satu dari beberapa tujuan perkawinan, yaitu tujuan reproduksi regenerasi. Dalam beberapa sumber dari nash al-Qur'an dan Sunnah telah dipaparkan tentang salah satu aspek dari perkawinan adalah reproduksi (melahirkan keturunan).

1. Periodisasi Umur dan kecakapan hukum dalam Islam

Definisi anak secara bahasa merujuk pada kamus bahasa Indonesia diartikan dengan manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.³⁷ Periodisasi umur dalam kaitannya dengan kecakapan hukum, seseorang tersebut dinyatakan sebagai manusia dewasa. Dalam Islam sendiri dikenal istilah tamyiz, baligh, dan rusyd yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri.³⁸ Akan tetapi, dalam kategori umur untuk mengetahui seseorang dianggap dewasa terdapat keragaman yaitu terdapat perbedaan umur manusia dalam suatu tahap kehidupan. Artinya periode-periode yang telah digariskan dalam Islam

³⁷ Tri Rama K., Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Karya Agung, 1982), hlm 3

³⁸ Dadan Muttaqien, Bidang Perkawinan dan Perjanjian, (Yogyakarta: Insania Citra Press), 2006, hlm 1

tentang batasan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung-jawabkan dampak dari perbuatannya tidaklah sepenuhnya berbanding lurus dengan batas umur yang pasti, karena diketahui bahwa perkembangan fisik maupun psikis seseorang itu tidak dapat dipisahkan dari situasi yang melingkupinya: seperti kadar makanan, pergaulan, tingkat sosial, ekonomi, dan tantangan yang dihadapinya.³⁹

Periodisasi kecakapan hukum seseorang tidaklah berbanding lurus dengan usia yang pasti. Maka dari itu ulasan tentang tahapan seseorang untuk menjadi makhluk dewasa erat kaitannya dengan beberapa aspek, di antaranya:

a. Kematangan usia

Untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda. Ahli-ahli hukum mencari putusannya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Mereka memahami perkembangan manusia pada tahap-tahap yang berbeda.

³⁹ Ibid., hlm. 1

Ahli-ahli hukum memberi batasan bahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan.⁴⁰

b. Peranan *Aqil* (daya nalar) dalam menentukan usia kedewasaan

Keadaan yang paling menentukan dan sangat diperlukan dalam menentukan usia kedewasaan (*tamyiz*) adalah bahwa seorang anak harus sudah *aqil* (bernalar). Bahwa batasan yang tepat dalam menggambarkan tingkat nalar pada seorang anak adalah seorang anak yang bisa memahami perkataan orang dan bisa memberikan tanggapan yang benar terhadap perkataan itu.

c. Tingkat kemampuan seorang *mumayyiz*

Kemampuan „*aqil* atau nalar adalah hal yang diperhitungkan pertama kali pada seorang anak untuk disebut *mumayyiz*.

d. Bulugh (tanda-tanda puberitas fisik) dan ciri khasnya

Ketika anak beranjak dewasa, menjadi lebih mudah untuk mengetahui dengan tepat tingkat perkembangannya. Pada tingkat tertentu dalam kehidupan seorang anak, berbagai macam aspek perkembangannya dapat diamati. Masa puberitas dapat dengan mudah terlihat jika seorang anak berada dalam pengamatan yang terus menerus dan seksama istilah bulugh yang juga dikenal dengan istilah puberitas merupakan masa transisi fisik dari fase kanak-kanak menjadi

⁴⁰ Ibid., hlm. 2

fisik orang dewasa dengan ditandai oleh gejala-gejala fisik, fenomena mimpi bagi laki-laki dan haid bagi kalangan perempuan. Seseorang dikatakan baligh jika mempunyai salah satu ciri dibawah ini:⁴¹

- 1) Mengeluarkan air mani (sperma), baik itu dalam keadaan terjaga maupun saat tidur.
- 2) Usianya sudah sempurna menginjak 15 (lima belas) tahun.
- 3) Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, yang dimaksud dengan rambut adalah rambut yang berwarna hitam yang berhimpun, bukan sembarang rambut, sebab pada anak kecil pun ada rambut yang tumbuh.
- 4) Haid dan hamil, usia baligh dapat ditetapkan dengan hal-hal yang telah dipaparkan di atas laki-laki dan perempuan. Namun, ada tanda tambahan terkait perempuan, yaitu mengalami haid dan hamil.

e. kedewasaan mental (*Rusyd*)

Hukum juga menekankan pentingnya pencapaian rusyd atau kedewasaan mental, yaitu baik kesempurnaan bulugh maupun kematangan mental, dalam arti mampu untuk berfikir (,aql). Cara yang digunakan terhadap satu orang dengan lainnya berbeda-beda menurut kegiatan dan kedudukannya dalam masyarakat. Seorang anak kuli

⁴¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm 581

bangunan misalnya, mempunyai kecakapan dalam bidang membangun rumah, caranya mengaduk labur (campuran pasir, semen dan gamping). Anak seorang tukang kayu dan anak seorang pedagang juga harus mempunyai keterampilan dasar dalam bidang mereka. Demikianlah faktor yang mempengaruhi periodisasi umur yang terdapat dalam Islam. Sederhananya untuk mengenal periode mumayyiz, „aqil baligh dan rusyd. Namun terdapat pengecualian pada kondisi-kondisi berikut:

- 1) Hilang kontrol kesadaran
- 2) Paksaan dan pengaruh yang tidak semestinya.

Dalam hukum Islam, bahwa kecakapan hukum disebut al-ahliyyah yang berarti kelayakan. Atas dasar itu, kecakapan hukum (al-ahliyyah) didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai “kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum Syariah”.⁴²

B. Hak-Hak Anak Dibawah Umur Dalam Hukum Islam

Dalam dunia kerja, Islam telah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan perburuhan. Diantaranya tentang hak dasar buruh dalam Al-Qur'an:

⁴² Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 109

hak buruh atas upah kerjanya, hak atas upah sesuai dengan nilai kerjanya, hak sebagai nafkah keluarga, hak bekerja sebagai kemampuannya, hak atas waktu istirahat, hak atas perlindungan kekerasan, hak jaminan sosial, dan penghargaan masa kerja, dari sisi majikan digariskan beberapa kewajiban, diantaranya: baik kepada buruh, membangun kesetaraan dengan buruh, bertanggung jawab terhadap kesehatan buruh, jujur dalam menjalankan usaha, bertanggung jawab dalam tugas, larangan menumpuk modal membekukannya demi kepentingan pribadi, larangan penyalahgunaan kekayaan, dan menghindari berlebih lebihan, efektif dalam menjalankan usaha.⁴³ Di antara hak-hak yang dimiliki oleh anak dibawah umur adalah:

1. Hak Diberi Nafkah

Berdasarkan Firman Allah dalam surat Al-Baqirah ayat 233 berikut ini; Artinya "Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik atau makruf." (QS. AlBaqarah: 233)⁴⁴ Ayat tersebut menunjukkan wajibnya pemberian nafkah bagi anak dibawah umur oleh ayah/orangtuanya. Dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Daud Artinya; "Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah apabila meninggalkannya pada

⁴³ Umniah Labibah, Wahyu Pembebasan: Relasi Buruh-Majikan, (Yogykarta: Pustaka Alif, Cet. Ke-1, 2004), hlm 32dan 38

⁴⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Toha Putra, 1989), hal. 150

usia sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka." (HR. Abu Daud)

2. Hak mendapatkan Pendidikan

Berdasarkan Firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۖ [التحریم: ٦]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim: 6)⁴⁵

3. Memperoleh Masa Depan Yang Baik

Berdasarkan, berdasarkan An-Nisaa' ayat 9 berikut ini:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ ۙ [النساء: ٩]

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisaa' 9)⁴⁶

Dalam hadist Rasulullah yang diriwayarkan oleh Muttafaq `alaih yang artinya; "Sesungguhnya kamu jika meninggalkan ahli ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih balk daripada kamu meninggalkan mereka

⁴⁵ Ibid. hal. 951

⁴⁶ Ibid.hal.116

sebagai orang-orang yang menjadi beban bagi masyarakat". (HR. Muttafaq' alaih).

4. Dilindungi harta kekayaannya

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa' ayat 10 berikut ini;

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ
سَعِيرًا ۝ ١٠ [النساء: ١٠]

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. AnNisa: 10)⁴⁷

Anak-anak dibawah umur itu mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan, persiapan masa depan, dilindungi harta kekayaannya yang wajib dilaksanakan atau dipenuhi oleh keluarga atau mahramnya. Karena itu, tidak ada hak bagi ayah dan ibu, apalagi yang selain keduanya, memaksa anak-anak untuk bekerja dan mencari nafkah sendiri. Mempekerjakan anak di bawah umur sama dengan merampas hak-hak anak, karena itu perbuatan ini bertentangan dengan spirit hukum Islam, yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak manusia (huquq al-insan). Seorang anak kecil sama saja dengan seorang manusia yang harus dilindungi hak asasinya. Dengan demikian mempekerjakan anak di bawah umur sama dengan berbuat kezaliman kepada anak tersebut. Perbuatan zhalim sangat dilarang dalam Islam.

⁴⁷ Ibid.hal.116

Untuk memberantas atau mengurangi praktik mempekerjakan anak di bawah umur perlu ada langkah-langkah kongkrit untuk menyelesaikan problem ekonomi umat, baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga social dan keagamaan. Tanpa ada penyelesaian problem ekonomi mustahil praktik mempekerjakan anak di bawah umur dapat dicegah, sebab di antara penyebab utamanya adalah motif ekonomi. Pemerintah melakukan langkah-langkah kongkrit dalam penanganan praktik mempekerjakan anak di bawah umur dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dan membuka lembaga pendidikan yang dikhususkan untuk anak-anak dhuafa dan mustad'afin.⁴⁸

Berdasarkan pemaparan diatas Islam tidak ada larangan untuk bekerja bagi umat Islam namun anak dibawah umur (belum Baligh) dalam Islam anak menjadi tanggungan orang tuanya untuk memelihara dan mencukupi semua kebutuhannya baik jasmani dan rohani.

C. Macam-Macam Hak Anak Dibawah Umur Dalam Hukum Islam

Islam menekankan agar orang tua dalam mendidik anak tidak memaksakan kehendaknya. Mereka diingatkan bahwa anak-anak harus dipersiapkan untuk menghadapi zaman yang akan dilaluinya kemampuan orang tua menangkap kecenderungan positif dari perkembangan anak menjadi sangat penting. Orang tua berkewajiban mendorong dan mengarahkan perkembangan

⁴⁸ <http://sarmidihusna.blogspot.co.id/2008/12/mempekerjakan-anak-di-bawah-umur.html>

positif anak, ukuran pokok dari pengarah dan bimbingan itu adalah sejauh mana perkembangan anak sejalan dengan norma dan kewajiban agama.⁴⁹

Dalam kasus yang terjadi tersebut anak yang bekerja dengan motifasi Mendidik anak yaitu:

- a. Membantu orang tuanya
- b. Masih bersekolah Tugas menyiapkan generasi penerus yang berkualitas adalah tugas utama dari suami dan istri. Al-Qur'an memerintahkan agar suami dan istri (ayah dan ibu) mempersiapkan generasi yang berkualitas dan takut akan hadirnya generasi yang lemah sebagaimana firman Allah SWT.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ۙ [النساء: ٩]

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (An-Nisa' : 9).⁵⁰

Islam memperhatikan masalah anak tidak hanya setelah anak dilahirkan, tetapi bahkan sejak anak itu belum merupakan suatu bentuk. Syariat Islam memberikan perlindungan yang sangat besar terhadap janin yang berada dalam rahim ibu, baik perlindungan jasmaniah maupun rohaniyah sehingga janin

⁴⁹ Nasir Djamil, Op. Cit., Hlm. 11.

⁵⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jakarta: Dept. Agama R.I., 1983), hlm 15

tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik yang pada akhirnya lahir ke dunia dengan sempurna.⁵¹

Oleh karena itu Islam memberikan hak-hak kepada janin diantaranya adalah dimuliakan, dijaga dan dilindungi sebelum lahir ke dunia ini dari segala tindakan bodoh yang dilakukan oleh orang-orang murtad, sesat lagi kufur terhadap segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Ajaran syariat Islam tidak berhenti sampai di situ, ia juga memerintahkan kepada ulil amri (pejabat setempat) untuk ikut serta melindungi, memperhatikan situasi dan kondisi ibu hamil. Berbuat baik kepada ibu hamil adalah wajib, kalau sang ibu melakukan tindakan kriminal dan pemerintah hendak menjatuhkan hukuman kepadanya hendaklah jangan sampai mengganggu atau mempengaruhi kondisi kesehatan janin yang ada dalam kandungannya.⁵² Allah SWT (dengan ke Maha Pemurahan-Nya) juga meringankan pelaksanaan berbagai kewajiban bagi ibu hamil, seperti kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan, jika dengan mengerjakannya dapat menimbulkan madharat terhadap janin atau bayi (sesudah lahir). Akan tetapi dia wajib menggantinya setelah illatnya itu hilang.⁵³ Anak adalah titipan ilahi yang harus disayangi, dikasihi dan dicintai. Anak adalah buah hati yang akan

⁵¹ Abu Hadiyan Shafiyarrahman, Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam, (Yogyakarta : Al-Manar, 2003), hlm 25

⁵² Abdurrazaq Husein, Hak Anak dalam Islam, (Bandung : Putaka, Cet.I, 2001), hlm. 18

⁵³ Ibid, hlm. 20

menghasilkan secercah harapan. Anak merupakan amanat Tuhan yang harus dijaga baik oleh keluarga, masyarakat dan negara.

1. Hak Anak Untuk Mendapatkan Pengakuan dalam Silsilah Keturunan

Hak anak untuk memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan merupakan hak terpenting dan memiliki faedah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri.⁵⁴ Pengakuan dalam silsilah dan keturunan disebut juga dengan keabsahan. Keabsahan adalah sentral bagi pembentukan keluarga dalam Islam. Setiap anak muslim mempunyai hak atas legitimasi (keabsahan), yakni dipanggil menurut nama ayah yang diketahui.⁵⁵

Dalam hal ini dapat diwujudkan atau dibuktikan dengan pembuatan akta kelahiran sebagai bukti pengakuan negara terhadap status kewarganegaraannya. Dengan akta itu pula anak akan mendapatkan kepastian hukum tentang keberadaan orang tuanya. Selebar surat ini akan terus diperlukan sampai ia dewasa kelak.⁵⁶

⁵⁴ Abdurrazaq Husein, Hak Anak dalam Islam, (Bandung : Putaka, 2001)Cet.I, hlm. 24, mengutip Abu Hadiyan Shafiyarrahman, Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam ,(Yogyakarta : Al-Manar, 2003), hlm. 48

⁵⁵ Ahmad Abdullah Assegaf, S ,Islam dan KB, (Jakarta : Lentera Basritama, 1997), hlm.38

⁵⁶ Marfu'ah Panji Astuti, "Pelanggaran Hak-Hak Anak Di Sekitar Kita" , Jakarta, Nakita, 26 Juli 2003, hlm 7

2. Hak Untuk Hidup

Hak hidup adalah suatu fithrah. Tiada suatu makhlukpun yang dapat memberikan kematian kepada yang lain, sebab itu hanya milik Allah sang pencipta, tidak ada perubahan dan pergantian bagi sunnah (ketetapan Allah).⁵⁷

Islam menyuruh seluruh umat manusia agar senantiasa menjaga hak hidup anak kecil atau bayi, baik yang orang tuanya muslim ataupun non muslim, makanya dalam setiap pertempuran, Islam melarang seluruh kaum muslim membunuh kaum hawa dan anak-anak.⁵⁸

3. Hak Mendapatkan Nama yang Baik

Syariat Islam mewajibkan kepada orang tua untuk memberikan nama yang baik bagi seorang anak, karena nama dalam pandangan Islam memiliki arti penting dan pengaruh besar bagi orang yang menyandangnya. Selain itu nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah mati. Nama itu sendiri merupakan tali pengikat yang amat kuat dengan semua tali keturunannya.⁵⁹ Menurut Muhammad Nur Abdul Hafizh, ada tiga kriteria dalam memilih nama yang baik, yaitu :

⁵⁷ Kamil Musa, Anak Perempuan dalam Konsep Islam, (Jakarta : CV. Firdaus, 1994), hlm 14

⁵⁸ Abdurrazaq Husein, Op.Cit,hlm. 22

⁵⁹ Ibid, hlm. 27

- a. Nama yang diambil hendaknya berasal dari nama-nama dari ahli agama,
 - b. Nabi-nabi, dan rasul serta nama-nama orang yang saleh, dengan niat semata-mata mendekatkan diri kepada Allah.
 - c. Diupayakan agar anak dinamai dengan nama yang sederhana dan tidak menyulitkan lidah dalam mengucapkannya.
 - d. Nama yang digunakan memiliki makna yang baik.
4. Hak Anak Untuk Menerima Tebusan (Aqiqah)

Menurut Abu Suja', aqiqah adalah menyembelih binatang sebab dari kelahiran anak pada hari ketujuhnya. Hukumnya sunnah, dan yang disunnahkan adalah orang tua si anak.⁶⁰ Syariat Islam sangat memperhatikan dalam melindungi anak, salah satunya adalah dengan mengajak pemeluknya untuk mengeluarkan harta sebagai pengungkapan rasa suka cita atas lahirnya seorang anak, yaitu dengan mengajak umat Islam untuk menyajikan tebusan dari anak yang baru saja lahir dan membatasinya dengan seekor kambing untuk anak perempuan dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki. Selanjutnya syariat Islam lebih mengutamakan agar aqiqah itu dilaksanakan pada hari ke tujuh dari tanggal kelahirannya.⁶¹ Ada banyak ayat-ayat yang diperkuat oleh hadist rasul yang

⁶⁰ Abu suja', Fathul Qorib Mujib (Taqrib), (Bandung : Ma'arif, tt), hlm. 63

⁶¹ Adil Fathi Abdullah, Menjadi Ibu Dambaan Ummat, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002) hlm. 48

memberi petunjuk tentang disyariatkannya aqiqah. Mereka yang mensyariatkannya aqiqah berbeda pendapat tentang hukumnya, apakah itu wajib ataupun sunnah, namun sebagian besar berpendapat bahwa aqiqah hukumnya mustahab(dianjurkan) sementara itu menurut Adh-Dhahiriyyah dan Abu al-Hasan al- Basri mewajibkannya.⁶²

Di dalam aqiqah tersebut ada nilai pengorbanan harta dan sedekah kepada fakir miskin, bersyukur kepada Allah SWT. Dan berdoa untuk bayi semoga terhindar dari kedurhakaan terhadap orang tua dan supaya berbakti kepada keduanya.⁶³ Menurut Abu Muhammad Ishom bin Mar'i yang dikutip oleh Muhammad Fauzul Adhim menjelaskan bahwa salah satu keutamaan dalam aqiqah adalah mengamalkan seluruh daging sembelihan, sehingga akan menyenangkan fakir miskin, karib kerabat serta menambah kecintaan teman-teman dan sahabat dekat. Melalui aqiqah, kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain terutama para tetangga, kerabat dekat, dan fakir miskin.

5. Hak Akan Penyusuan

Bagaimanapun juga, mendapat ASI adalah hak tiap anak, mustahil seorang bayi meminta atau menuntut haknya yang satu ini. Karena bayi belum mempunyai kekuatan apapun. Orang tualah yang seharusnya

⁶² Kamil Musa, Op.Cit, hlm. 37

⁶³ Adil Fathi Abdullah, Op.Cit, hlm. 49

menyadari bahwa memberikan ASI pada bayinya adalah sebuah kewajiban dan bentuk tanggung jawab.

Keterangan diatas menggambarkan bahwa lamanya menyusukan anak bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya adalah dua tahun penuh. Ini adalah hak anak yang harus dipenuhi oleh ibu kandungnya namun hal ini bisa dawakilkan pada wanita lain apabila ibu kandungnya mendapatkan halangan yang menyebabkan tidak dapat memberikan ASI pada anaknya. Menurut Abu Suja, apabila seorang perempuan memberikan ASInya kepada seorang anak maka anak yang menyusu tersebut menjadi anaknya, tetapi harus memenuhi dua syarat yaitu:

- 1) Apabila anak yang disusui tersebut berusia kurang dari dua tahun.
- 2) Apabila Anak telah menyusu lima kali secara terpisah-pisah.⁶⁴

Allah telah mewajibkan agar anak disusui oleh ibunya selama dua tahun penuh. Pada masa ini merupakan masa-masa yang paling menentukan dalam pembentukan kesempurnaan anggota tubuh, kecerdasan dan kesehatan sang bayi, baik jiwa maupun raganya.⁶⁵

6. Hak Anak Untuk dijaga Kebersihannya

Dalam rangka melindungi kesehatan dan pertumbuhan anak, syariat Islam mengajak kepada para pemeluknya untuk melaksanakan sejumlah

⁶⁴ Abu suja', Op. Cit, hlm.51

⁶⁵ Abu Hadiyan Shafiyarrahman, Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam , (Yogyakarta : Al-Manar, 2003), hlm. 59

kegiatan yang diperkirakan mampu melindungi, menjaga dan menjamin keselamatan anak dari berbagai penyakit serta mencegah segala hal yang mampu mengganggu pertumbuhannya. Apabila syariat Islam mengajak kepada kebersihan maka tak aneh bila menghilangkan kotoran dan penyakit dari anak itu merupakan suatu kewajiban. Sebagai contoh adalah berkhitan, mencukur rambut dan selalu menjaga kebersihan tubuh anak setiap saat.

a. Khitan

Salah satu kewajiban dari orang tua terhadap anak adalah menghitankan anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Menurut arti bahasa khitan adalah memotong dan dalam istilah ilmu fiqh khitan adalah memotong kulit yang menutupi kepala zakar (kemaluan bagi laki-laki) dan memotong sedikit daging padaujung clitoris yang berada di lubang farji (kemaluan perempuan) bagian atas. Khitan termasuk perkara yang disyariatkan Allah kepada hamba-Nya demi menyempurnakan kesehatan jasmani maupun rohaninya. Sisi lain dari khitan adalah dijadikan syarat syahnya shalat dan juga disebutkan oleh para ahli fiqh, bahwa khitan merupakan pembeda dari kaum kafir dan sebagai syiar agama Islam. Sehingga apabila ditemukan mayat yang sudah dikhitan yang ditemukan di antara orang kafir, mayat tersebut

dipisahkan, dishalatkan, dan dimakamkan di kompleks pemakaman kaum muslim.⁶⁶

b. Mencukur Rambut Kepala

Dengan pencukuran ini hilanglah kotoran-kotoran yang terbawa dari rahim yang menempel pada rambut sehingga akan dapat dihindari berkembangnya banyak mikro organisme yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk mencukur rambut kepala anak pada hari ketujuh pada kelahirannya.⁶⁷

c. Menjaga Kebersihan Anak

Yaitu menjaga kebersihan tubuh dan menghilangkan kotoran-kotoran pada tubuhnya.⁶⁸

7. Hak Anak Untuk Mendapatkan Pengasuhan

Hak anak untuk mendapatkan pengasuhan disebut dengan hadhanah. Pengertian hadhanah menurut bahasa adalah mengumpulkan sesuatu kepada dekapan. Sedangkan hadhanah dalam ilmu fiqih adalah kewajiban terhadap anak untuk mendidik dan melaksanakan penjagaan serta menyusun perkara-perkara yang berkaitan dengannya apabila antara suami dan istri berpisah(bercerai) dan yang berhak merawat anak tersebut

⁶⁶ Muhammad Nur Abdul Hafizh, Op. Cit, hlm. 99

⁶⁷ Abu Hidayan safiyarrahman, Op. Cit.hlm. 88

⁶⁸ Ibid,hlm. 89

adalah pihak istri sampai umur 7 tahun, setelah itu anak disuruh memilih antara ayah dan ibunya.⁶⁹

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Dibawah Umur

Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pekerja anak, dimana batasan umur masih terdapat perbedaan akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang mu'amalah maaliyah sangat berhati-hati terutama dalam menentukan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu: 18 tahun keatas. Walau seorang anak yang berumur dibawah 18 tahun tetap diperbolehkan dalam bekerja, namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan semua elemen. Mengenai hak dan kewajiban, yang akan dibandingkan hanyalah hukum Islam dengan hukum Barat.

Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.

⁶⁹ Abu Suja', Op. Cit, 53

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan bercerai. Tugas orang tua, Menurut Loebby, menjaga dan mengawasi anak mereka dari tindakan-tindakan buruk. Jika kemudian mereka dikenakan sanksi, itu bukan semata-mata karena perbuatan anak mereka, melainkan karena perbuatan mereka sendiri yang tidak memperhatikan apa yang dilakukan anak-anaknya. Selain itu, hak anak terhadap orang tuanya adalah anak mendapat pendidikan, baik menulis maupun membaca, pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rezeki yang halal.

Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad sebagai berikut:

رَزَقَهَا نَسْتَوْفِي حَتَّى تَمُوتَ لَنْ نَفْسًا فَإِنَّ الطَّلَبَ فِي وَأَجْمِلُوا اللَّهَ اتَّقُوا النَّاسُ أَيُّهَا
خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ الطَّلَبِ فِي وَأَجْمِلُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا عَنْهَا أَبْطَأَ وَإِنْ

Artinya: Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati, hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. (HR. Ibnu Majah no. 2144, dikatakan shahih oleh Syaikh Al Albani).⁷⁰

Dalam hadits tersebut terdapat dua maslahat yang diperintahkan untuk dicari yaitu maslahat dunia dan maslahat akhirat. Maslahat dunia dengan pekerjaan yang halal, maslahat akhirat dengan takwa.

⁷⁰ <https://rumaysho.com/9616-mencari-pekerjaan-yang-halal.html>

Ibnul Qayyim *rahimahullah* menyebutkan alasan kenapa dua hal itu digabungkan. Beliau berkata, “Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menggabungkan antara maslahat dunia dan akhirat dalam hadits “*Bertakwalah engkau kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki.*” Nikmat dan kelezatan akhirat bisa diraih dengan ketakwaan pada Allah. Ketenangan hati dan badan serta tidak rakus dan serakah pada dunia, dan tidak ada rasa capek dalam mengejar dunia, itu bisa diraih jika seseorang memperbagus dalam mencari rezeki.

Oleh karenanya, siapa yang bertakwa pada Allah, maka ia akan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan akhirat. Siapa yang menempuh jalan yang baik dalam mencari rezeki (*ijmal fii tholab*), maka akan lepas dari rasa penat dalam mengejar dunia. Hanya Allah yang memberikan pertolongan. Berarti jika kita mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat serta tidak ada rasa letih dalam mencari nafkah, maka cukupkanlah diri pada pekerjaan yang halal.

BAB IV

ANALISIS

A. Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Yang Terbentuk Mempekerjakan Anak Dibawah Umur

Mempekerjakan anak di bawah umur belakangan ini menjadi fenomena yang marak di mana-mana. Terutama semenjak krisis ekonomi mendera Indonesia, dan jumlah orang miskin bertambah, fenomena ini semakin kentara. Banyak anak-anak yang semestinya masih menikmati masa kecilnya untuk bermain dan belajar, sudah dipekerjakan. Mereka yang seharusnya ada di taman main atau di bangku sekolah, justru berada di tempat-tempat yang tidak layak, seperti pasar, terminal, lampu merah, dan bahkan ada yang di pabrik-pabrik. Anak-anak tersebut kehilangan kesempatan untuk meraih masa depan yang cerah. Karena masa yang seharusnya digunakan untuk penempatan mental spiritual dan pemberdayaan insani untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan, justru dihabiskan di tempat yang selayaknya hanya di tempat orang dewasa. Anak-anak tersebut telah memerankan diri sebagai orang dewasa bekerja mencari nafkah untuk membantu keluarganya. Mereka kehilangan hak-haknya sebagai anak-anak dan terampas masa depannya. Mempekerjakan anak di bawah umur adalah menyuruh dan atau membiarkan anak-anak usia di bawah 18 tahun bekerja selayaknya orang dewasa guna mendapatkan materi baik

untuk kebutuhan dirinya sendiri, membantu keluarganya, atau diambil manfaat oleh orang-orang yang mempekerjakannya

Pembangunan ketenagakerjaan sasaran utamanya diarahkan untuk menjamin hak-hak tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminatif atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Untuk mencapai sasaran pembangunan ketenagakerjaan diperlukan berbagai penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong dan menggerakkan pembangunan tersebut. Peranan hukum ketenagakerjaan pada hakikatnya menghendaki agar hukum tidak lagi dipandang sebagai perangkat norma semata, melainkan hukum dipandang juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang harus selalu dapat memberikan arah yang melindungi, mengatur, mendorong, merencanakan, menggerakkan dan mengendalikan masyarakat sesuai dengan tahapan-tahapan pembangunan yang dilaksanakan.

Penerapan hukum ketenagakerjaan dalam perlindungan tenaga kerja anak yang bekerja di luar hubungan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, dikarenakan makin meresahkannya tenaga kerja anak dengan alasan kemiskinan keluarga, sehingga menurut Irwanto memang sulit memisahkan antara partisipasi anak dalam aktivitas ekonomi dengan eksploitasi ekonomi anak. Mempergunakan anak-anak bagi pengusaha bukan merupakan tanpa alasan,

karena anak-anak yang bekerja umumnya drop-out Sekolah Dasar dan berasal dari keluarga miskin yang dipekerjakan untuk memperoleh keuntungan secara serakah. Kecenderungan pengusaha mempergunakan anak-anak (usia 12 sampai dengan 16 tahun) sebagai tenaga kerja, karena upah murah dan anak-anak lebih mudah diatur daripada tenaga kerja orang dewasa. Di dalam praktiknya banyak anak-anak ditempatkan sebagai tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja, karena anak dipandang sebagai subordinat orang dewasa atau orang tuanya yang harus selalu tunduk dan mengikuti kehendaknya, sehingga anak dilihat bukan sebagai subjek hukum tetapi sebagai objek yang dapat diperlakukan sesuai kehendak orang dewasa. Berbeda dengan pendekatan abolisionis, pendekatan proteksionis bertolak dari suatu anggapan bahwa menghapuskan sama sekali tenaga kerja anak merupakan suatu hal yang tidak mungkin, karena dalam praktik sulit untuk direalisasi. Jika upaya abolisionis dipaksakan, hasilnya justru akan merugikan kepentingan anak itu sendiri. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan bukannya melarang anak bekerja, tetapi melindungi anak dan praktik-praktik pekerjaan yang membahayakan, eksploitatif, dan merugikan kepentingan anak. Pendekatan tersebut terakhir, yaitu pendekatan proteksionis dan pemberdayaan bersifat komplementer, artinya saling memperkuat dan saling membutuhkan untuk keberhasilannya. Usaha para anak untuk memberdayakan diri menuntut pelaksanaan hak-hak serta perbaikan-perbaikan yang telah ditentukan oleh peraturan-peraturan

perlindungan anak, sedangkan melalui strategi pengorganisasian diri suara anak dapat mempengaruhi isi dan substansi dari langkah-langkah perlindungan tersebut supaya lebih mendekati kepentingan dan keinginan anak.

Pekerja anak disebutkan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu :

Pasal 68

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 69

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- 2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan. :
 - a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 70

- 1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
- 3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 71

- 1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- 2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
 - b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan

c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

- 3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 72

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 73

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 74

- 1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- 2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;

- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- 3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 75

- 1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.
- 2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁷¹

B. Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan *istiqla* (penelitian empiris) dan *nash-nash* al-Qur'an maupun hadits diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup di antaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.⁷² Dengan kata lain, seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *mashlahah*. Tidak ada hukum syara' yang

⁷¹ Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003, 68-75, Ketenagakerjaan

⁷² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* terj. Saefullah Ma'shum, dkk, cet.3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hal. 423

sepi dari mashlahah. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak.⁷³

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Dengan Motivasi

Mendidik Anak dan Membantu Orang Tuanya Anak-anak hari ini adalah orang dewasa di masa yang akan datang. Mereka akan mempunyai tanggung jawab yang cukup besar sebagaimana layaknya dalam kehidupan orang-orang dewasa pada umumnya. Keadaan anak di masa datang akan bergantung kepada sikap dan penerimaan serta penerimaan orang tua terhadap anak-anaknya pada saat sekarang. Salah satu perbuatan yang amat dianjurkan dalam Islam adalah menunjukkan kasih sayang dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Orang tua dianjurkan untuk berbuat baik pula pada anak-anaknya (yang membutuhkan) terutama dibidang pendidikan dan mengajar mereka secara layak. Tanggung jawab seorang Muslim atas kesejahteraan anak-anak mereka merupakan prioritas utama.⁷⁴ Berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar nantinya tumbuh dan berkembang secara formal. Pendidikan seorang anak yang belum dewasa haruslah seimbang. Pendidikan keduniawian ditujukan untuk mempersiapkan masa depan seorang anak hingga suatu saat setelah dewasa nanti hidup mandiri.

⁷³ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 402-403.

⁷⁴ Mahmudah Abd. Al-Ati, Keluarga Muslim, hal. 256

Pendidikan keagamaan dimaksudkan agar setelah dewasa tetap tunduk dan patuh kepada Allah swt, Islam menekankan agar orang tua dalam mendidik anak tidak memaksakan kehendaknya. Mereka diingatkan bahwa anak-anak harus dipersiapkan untuk menghadapi zaman yang akan dilaluinya kemampuan orang tua menangkap kecenderungan positif dari perkembangan anak menjadi sangat penting. Orang tua berkewajiban mendorong dan mengarahkan perkembangan positif anak, ukuran pokok dari pengarahan dan bimbingan itu adalah sejauh mana perkembangan anak sejalan dengan norma dan kewajiban agama.⁷⁵ Dalam al-Quran surat al-Isra ayat 31 anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ تَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا [الإسراء: ٣١]

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Tafsir quraish shihab Karena perkara rezeki ada di tangan Allah, maka tidak diperkenankan bagi kalian untuk membunuh anak-anak karena khawatir akan jatuh miskin. Sebab Kamilah yang menjamin rezeki kalian alahanak kalian itu. Sesungguhnya membunuh mereka ad-anak dan perbuatan dosa yang besar.

⁷⁵ Fuaddudin TM Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam, hal. 44

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 ٢٧ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٨]
 الأنفال: ٢٧-٢٨

Dijelaskan dalam al-Quran surat al-Anfal Ayat 27 bahwa larangan mengkhianati Allah SWT dengan meninggalkan kewajiban yang diamanatkan kepada kita. Hal ini didukung al-Quran surat al-Anfal ayat 28 yang dijelaskan dalam tafsir al-Azhar bahwa anak adalah ujian bagi orang tua. Pemeliharaan anak bukan sekedar kewajiban keluarga akan tetapi juga kewajiban masyarakat untuk menjaga dan memelihara dalam hal sosial. Maka menyuruh anak bekerja dengan tujuan mendidik dan membantu orang tuanya dengan tidak menimbulkan kerusakan bagi jiwa, fisik serta mentalnya maka diperbolehkan karena sesuai dengan masalah mursalah dan syaria Islam.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Dengan Motivasi Mencari Uang

Biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari anak, terutama kebutuhan primer (sandang pangan papan dan pendidikan), selama mereka masih dibawah umur dan tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri (sekaligus tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi) sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua. Kewajiban ini bersifat temporer (tidak selamanya). Dalam arti, jika seorang anak laki-laki sudah bisa berdikari dan anak perempuan sudah resmi berada di bawah tanggung

jawab seorang suami, kewajiban tadi dengan sendirinya menjadi sirna.⁷⁶

Dalam uraian kasus di atas orang tua menyuruh anaknya yang masih di bawah umur untuk bekerja yang seharusnya mereka mendapatkan hak untuk dipelihara, dan dididik sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi keadaan ekonomi orang tuanya yang menyebabkan anak harus bekerja. Keadaan yang demikian seharusnya tidak menyebabkan anak kehilangan masa kecilnya dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29-30 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩ [النساء: ٢٩]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (An-Nisa' : 29).⁷⁷

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝ ٣٠ [النساء: ٣٠]

Artinya Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (An-Nisa' : 30).⁷⁸

Dari ayat di atas memberikan gambaran hubungan timbal balik orang tua harus melakukan fungsi edukasi secara efektif terhadap anak-anaknya. Peran orang tua, khususnya ayah sebagai pemimpin tertinggi

⁷⁶ Muhyiddin Abdul Hamid, Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak, hal. 13

⁷⁷ Depag, Al-Qur'an dan Terjemah, hal. 122

⁷⁸ Ibid, hal. 122

dalam struktur keluarga untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya sangatlah dominant. Ditinjau dari Masalah Mursalah maka keadaan seperti itu yaitu anak di bawah umur yang bekerja lebih banyak terdapat kemadaratannya diantaranya

- a). Sekolahnya terbengkalai
- b). Dengan motifasi mencari uang.

Maslahah mursalah mempunyai prinsip dasar perlindungan yang dapat menjaga hak-hak manusia dalam hal ini untuk menjaga terjadinya perlakuan-perlakuan salah (pelanggaran hak-hak) yang dapat terjadi kepada anak di bawah umur yaitu prinsip "masalah dharuriyah". Masalah dharuriyah adalah perkara-perkara yang dapat menjadi tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, kerusakan merajalela, timbulah fitnah, dan kehancuran yang hebat.⁷⁹ Mempekerjakan anak di bawah umur dalam keluarga atau dalam masyarakat mengakibatkan anak dalam posisi terancam fisik, jiwa dan mentalnya maka tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip masalah dharuriyah yaitu membahayakan jiwa anak di bawah umur, dan juga tindakan eksploitasi anak di bawah umur mengakibatkan terhambatnya perkembangan anak sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa yaitu membahayakan keturunan. Maka tindakan mempekerjakan anak dilarang menurut hukum

⁷⁹ Chaerul Uman, Ushul fiqh I, hal. 138-139

Islam. Dalam hukum Islam mempekerjakan anak dilarang atas dasar masalah mursalah yang membahayakan jiwa anak dan membahayakan keturunan sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa.

Seharusnya anak yang masih dibawah umur mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya bukan justru disuruh bekerja yang menimbulkan dampak negatif terhadap diri anaknya. al-Quran surat Luqman Ayat 14 mewajibkan anak mengikuti perintah orang tua sebagaimana di bawah ini :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ
لِي وَلَوْلَدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ ۚ [لقمان: ١٤]

Artinya : "...bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu...

(Q. s. Luqman : 14)⁸⁰

Maka mengikuti perintah orang tua untuk melakukan sesuatu (bekerja) hakikatnya diwajibkan menurut Islam. Namun kewajiban orang tua adalah memberi nafkah.

Orang tua dilarang menelantarkan anak dengan tidak memberi nafkah. Maka tidak memenuhi kebutuhan anak adalah larangan Syara' (hukum Islam). Berdasarkan ayat di atas mempunyai akibat hukum berupa perintah (wajib) untuk memberikan nafkah kepada anak Jika orang tua

⁸⁰ Depag, Al-Qur'an dan Terjemah, hal. 654

tidak memberi nafkah maka tindakan tersebut pelanggaran terhadap perintah (wajib).

Sesuai dengan tujuan pembangunan, mengerjakan tenaga anak-anak dan mereka yang berusia muda sekali tentunya sangat bertentangan dalam usaha mewujudkan tenaga kerja yang cerdas dan trampil. Begitupun juga anak diwajibkan untuk memelihara orang tuanya sebagaimana firman Allah surat al-Isra' ayat 23 sebagai berikut:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْكِبَرَ ۖ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ ۲۳﴾
[الإسراء: ٢٣]

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Q.s. al-Israa': 23).⁸¹

Dalam ayat di atas tampak jelas bagaimana Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tua secara optimal. Memberikan nafkah kepada keduanya adalah jalan terbaik untuk bisa merealisasikannya. Bakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua adalah bersifat sopan santun kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap anak. Termasuk dalam makna bakti adalah mencukupi kebutuhan-kebutuhan

⁸¹ Depag, Al-Qur'an dan Terjemah, hal. 427

mereka yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan anak. Menurut Maliki, Anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, bahkan menambahkan seorang anak yang kaya juga wajib memberi nafkah kepada khadam (pelayan) ayah ibunya yang miskin sekalipun mereka berdua tidak membutuhkan pelayan. Hanafi : anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, akan tetapi anak yang miskin tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya. Karena miskinnya anak menafikan kewajibannya. Imamiyah dan Syafi'i: Para anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua mereka dan seterusnya ke atas baik mereka itu laki-laki maupun perempuan.⁸² Hakikatnya Anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga karena mereka masih belum bisa untuk menjaga diri. Batasan kedewasaan dalam Islam telah di jelaskan oleh Rasulullah yaitu umur 15 tahun dalam hadis Nabi sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a: Rasulullah Saw. Memeriksa saya pada waktu akan pergi ke Perang Uhud, sedangkan saya ketika itu masih berumur empat belas tahun, lalu beliau tidak tidak memperbolehkan saya turut berperang. Kemudian pada waktu akan pergi ke perang khandaq, beliau memeriksa saya lagi, sedangkan saya ketika itu berumur lima belas

⁸² Muhammad Jawad Mugniyah, Terjemah Fiqih Lima Mazhab, Alih bahasa: Masykur dkk, hal. 431-432

tahun, maka beliau memperbolehkan saya turut berperang. Nafi' berkata, kemudian saya pergi menemui "umar bin Abd Al-Aziz, yang ketika itu dia sudah menjadi khalifah, dan menceritakan hadis tersebut kepadanya. Kemudian dia berkata, hadis inilah yang menjelaskan batas anak kecil dan dewasa. Kemudian dia menulis surat kepada semua pegawainya agar mereka mewajibkan anak yang sudah berumur lima belas tahun untuk melakukan perintah agama, sedangkan anak yang masih berumur di bawahnya berada dalam tanggungan keluarganya.⁸³

Jadi tindakan mempekerjakan anak yang berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak merupakan pelanggaran dari kewajiban orang tua yang diwajibkan untuk menjaga anak merawat karena anak merupakan amanat yang dititipkan Allah, atas dasar hak dan kewajiban diamnya orang tua atas kewajiban yang (nafkah) dibebankan kepada orang tua tersebut maka hal tersebut merupakan tindakan melanggar hukum. Menelantarkan anak dilarang menurut hukum Islam, apalagi anak disuruh bekerja mencari nafkah untuk diri sendiri atau untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Konsep dilarangnya mempekerjakan anak dalam Islam atas dasar tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak dalam keadaan terancam jiwa, fisik dan mentalnya maka dilarang.

⁸³ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Shakhiih Bukhari 11, hal. 158



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak dari permasalahan-permasalahan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Seorang anak yang di bawah umur tidak dibolehkan dalam bekerja, tetapi anak yang di bawah umur ini masih diperbolehkan dalam pekerjaan yang ringan yaitu harus memenuhi persyaratan: pekerjaan tersebut untuk mengembangkan bakat dan minat anak, yang mana anak harus ada izin dari orang tuanya, waktu kerja paling lama 3 jam sehari, tidak mengganggu waktu sekolah, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Islam juga tidak membolehkan pekerja anak di bawah umur, karna memperkerjakan anak dibawah umur sama dengan merampas hak-hak anak, perbuatan ini bertentangan dengan spirit hukum Islam, yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak manusia(huquq al-insan). Dalam Islam anak menjadi tanggungan orang tuanya untuk memelihara dan mencukupi semua kebutuhannya baik jasmani maupun rohani.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa hal yang menjadi masukan guna terciptanya generasi bangsa yang berintelektual tinggi dan bermoral baik:

1. Kepada para orang tua supaya lebih berperan aktif dalam mendidik anak-anaknya, dalam bidang pendidikan umum maupun bidang pendidikan agama, supaya mereka mendapatkan bekal untuk masa kininya dan masa yang akan datang. Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, bukan anak yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bangsa Indonesia membutuhkan generasi-generasi yang cerdas, dan kreatif untuk memajukan bangsa dan negara
2. Bagi anak yang dalam keadaan terpaksa bekerja, hendaklah terlebih dahulu meminta izin kepada orang tua atau walinya, karena sah dan tidaknya yang dikerjakan oleh mereka menurut hukum Islam tergantung pada isin bekerja yang diperbolehkan oleh orang tua atau walinya, hal ini karena anak masih dalam kekuasaan dan tanggung jawab orang tua atau wali.
3. Kepada pengusaha supaya lebih teliti dalam memilih pekerja atau buruh dalam memberikan pekerjaan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, karena anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
4. Bagi Pemerintah, hendaklah benar-benar menjalankan apa yang ada dalam Undang-Undang.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT dengan karunia-Nya telah dapat disusun tulisan yang jauh dari kesempurnaan ini. Shalawat dan salam semoga

dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari adanya kekeliruan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis, terlebih lagi ditinjau dari aspek metodologi maupun kaidah bahasanya. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis. Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat bagi para pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulssalam. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan(Hukum Perburuhan)*. Jakarta: PTIK.
- Abdul Rozak Husein, *Hak Anak dalam Islam*, fikahati Aneka, 1992.
- Abintoro Prakoso, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2009).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: PT. Toha Putra, 1989),
- Departemen,Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan*, Jakarta: CV. Pundi Aksara, 2004
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nahayatul Muqtashid*, terj, Imam Ghazali Said dkk, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jilid I, Jakarta: Pustaka Amini, 2002,
- Soetikno, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, 1997
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Soedjijarto, 1996, *Persepsi, Kebijakan dan Program Departemen pendidikan dan Kebudayaan yang Berdampak Langsung atautun Tidak Langsung terhadap pekerjaan Anak*, Mohammad Joni dan Zhulchaina Z. Tanamas.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986,
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-5, 2003
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Marfu'ah Panji Astuti, "Pelanggaran Hak-Hak Anak Di Sekitar Kita" , Jakarta, Nakita, 26 Juli 2003
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995,

- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001,
- Tri Rama K., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 1982.
- Dadan Muttaiqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006,
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009,
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Umniah Labibah, *Wahyu Pembebasan: Relasi Buruh-Majikan*, Yogyakarta: Pustaka Alif, Cet. Ke-1, 2004
- Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Dept. Agama R.I., 1983.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja*(Yuridis Susio Krimonologis), Armico.
- R. A. Koesnoen, 1964,
- Hilman Hadikusuma, 1987, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, dalam Irma Setyowati Soemitro.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen Sosial RI,
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
- Ali Achamad, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta, Chandra Pratama, 1996.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk, cet.3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008,
Mahmudah Abd. Al- Ati, *Keluarga Muslim*,

Fuaddudin TM *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*.

Muhyiddin Abdul Hamid, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*,

Chaerul Uman, *Ushul fiqh I*,

G. Kartasapoetra dkk, *Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila*,

Muhammad Jawad Mugniyah, *Terjemah Fiqih Lima Mazhab*, Alih bahasa : Masykur
dkk.

Kamil Musa, *Anak Perempuan dalam Konsep Islam*, Jakarta : CV. Firdaus, 1994

Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shakhih Bukhari 11*.

Internet

<https://fakagamauisu.wordpress.com/admistrasi/mempekerjakan-anak-dibawah-umur-menurut-hukum-islam/>

<http://sarmidihusna.blogspot.co.id/2008/12/mempekerjakan-anak-di-bawah-umur.html>

<http://sarmidihusna.blogspot.co.id/2008/12/mempekerjakan-anak-di-bawah-umur.html>

<http://ririnpuspitatarifr.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-anak-menurut-undang-undang.html>

<https://rumaysho.com/9616-mencari-pekerjaan-yang-halal.html>

http://quranhadisfitri.blogspot.co.id/2013_05_01_archive.html

<http://akuzamir.blogspot.com/2012/08/menjaga-diri-sendiri-dan-keluarga.html>